KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DRN25ZUX

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

		FINAL/TIDAK FINAL			1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1			H.4 X Final			
		H.2 X Pembetulan Ke-				H.5 Tidak Final		
			_ 		<u> </u>		-	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 68 807 581 1 722 000								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : WIDI ASTUTI								
3. PPh PASAL 21	YANG DIPOTONG		Т			<u> </u>	_	
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	NPWP) B.5	B.6	B.7		
3	21-402-01	8.310.000	8.310.000	0	5	415.500)	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01086/LS-TJ/RSJD.AHM/2022								
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 8 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor :			Tanggal	dd	mm	уууу		
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Insta	nsi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0	1 6 2 7 2 2	0 0 0				
	si Pemerintah :		RAH ATMA HUSADA MAHAK		IMANTAN	TIMUR		
C.3 ID Subunit C	Organisasi :		\Box					
C.4 Tanggal	:	0 8 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy			-		
C.5 Nama Penan	datangan :	RIANDY						
C.6 Pernyataan \	Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah saya	a isi dengan	benar dan telah saya		
			ı berlaku, Direktorat Jenderal Pajak	mengatur bahwa dok	umen ini tela	₃h ditandatangani secara		